

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin/24 September 2012
Waktu	: Pukul 10.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KKIII)
Acara	: 1. Membahas Progres Pelaksanaan Program e-KTP Terkait Dengan Target Penyelesaian Program dimaksud pada Bulan Desember Tahun 2012. 2. Membahas Permasalahan Pilkada Tahun 2011 Yang Belum terselesaikan dan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2012 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.M.Si/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya. B. 28 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri pada hari Senin tanggal 24 September 2012 dibuka pukul 10.45 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda rapat kerja yakni terkait dengan pembahasan progres pelaksanaan program e-KTP terkait dengan target penyelesaian program dimaksud pada Bulan Desember 2012, membahas permasalahan pilkada Tahun 2011 yang belum terselesaikan dan pelaksanaan Pilkada Tahun 2012 serta masalah lain-lain.
3. Menteri Dalam Negeri menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
Progres Pelaksanaan Program e-KTP:
 - a. Perkembangan Pelaksanaan e-KTP Sampai 23 September 2012
 - 1) Sampai tanggal 23 September 2012, hasil pelayanan perekaman e-KTP secara massal telah mencapai 147.411.969 orang Penduduk Wajib KTP.
 - 2) Perkembangan penyediaan blangko e-KTP yang sudah dicetak dan dilengkapi dengan chip sampai tanggal 23 September 2012 telah mencapai 112 juta keping, personalisasi sejumlah 64 juta keping, dan telah didistribusikan sejumlah 49.6 juta keping.

- b. Prediksi Pencapaian Pelaksanaan e-KTP Sampai 31 Desember 2012
 - 1) Kemendagri optimis bahwa target perekaman e-KTP sebanyak 172.015.400 orang Penduduk Wajib KTP akan dicapai pada akhir Desember 2012 dan diupayakan untuk percepatan, dengan harapan target perekaman e-KTP tersebut bisa diselesaikan akhir bulan Oktober atau pertengahan November 2012.
 - 2) Berdasarkan hasil perhitungan bersama Konsorsium dengan memperhatikan jumlah peralatan serta kecepatannya dalam pencetakan blangko e-KTP, diprediksi anggaran yang sudah tersedia pada Tahun 2012 yang diperuntukkan untuk blangko e-KTP sebesar Rp.1,68 Triliun akan bisa terserap 100% sampai 31 Oktober 2012 (batas kontrak).
 - 3) Apabila pihak Konsorsium tetap melanjutkan pencetakan e-KTP sampai 31 Desember 2012, maka diprediksi realisasi fisiknya adalah 172 juta keping blangko e-KTP yang dilengkapi dengan chip, 100 juta keping yang sudah dipersonalisasi, dan 70 juta keping yang sudah didistribusi, yang pembayarannya melalui dana APBN Tahun 2013.
- c. Rencana Penyelesaian Target e-KTP Pada Tahun 2013
 - 1) Penyelesaian pencapaian target untuk pencetakan e-KTP secara massal memerlukan anggaran sebesar Rp.1,045 Triliun untuk pembiayaan: 26.340.367 keping blangko e-KTP yang dilengkapi dengan chip, 94.340.367 keping yang dipersonalisasi, dan 126.184.532 keping yang didistribusi.
 - 2) Sedangkan untuk pelaksanaan kelanjutan penerapan e-KTP secara reguler pada Tahun 2013 memerlukan anggaran sebesar Rp. 552,273 M.
 - 3) Agar target e-KTP secara massal untuk 172.015.400 orang Penduduk Wajib KTP dapat diselesaikan, dan untuk meneruskan pelayanan e-KTP secara reguler, maka Kemendagri mengharapkan anggaran tersebut dapat disediakan pada APBN Tahun 2013.
- d. Fungsi dan peranan Kemendagri dalam penyelenggaraan program e-KTP adalah memonitor, mendorong, mengawal, dan memfasilitasi, agar kewajiban Konsorsium dan Pemerintah Daerah dapat dipenuhi tepat waktu.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

- a. Permasalahan Pemilukada Tahun 2011 yang belum diselesaikan
 - 1) Pada Tahun 2011, sebanyak 87 Daerah melaksanakan Pemilukada, yakni 5 Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur, 71 Pemilukada Bupati/Wakil Bupati, serta 11 Pemilukada Walikota/Wakil Walikota. Dari 87 daerah yang melaksanakan Pemilukada pada Tahun 2011, dapat diperinci sebagai berikut:
 - a) 82 Pemilukada berjalan lancar dan Kepala Daerahnya telah dilantik;
 - b) 2 Pemilukada Kabupaten yang harus melaksanakan Pemilukada Putaran Kedua pada Tahun 2012, yakni Pemilukada Kabupaten Dogiyai (Papua) dan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara (Bengkulu); dan
 - c) 3 Pemilukada Kabupaten yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Tahun 2012, yakni Pemilukada Kabupaten Pati (Jawa tengah), Pemilukada Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara) dan Pemilukada Kabupaten Yapen (Papua).

- 2) Dalam pelaksanaan Pemilukada Tahun 2011, terdapat 78 Pemilukada yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, dengan 131 registrasi perkara, dengan hasil sebagai berikut:
 - a) 13 perkara dikabulkan;
 - b) 87 perkara ditolak;
 - c) 29 perkara tidak diterima; dan
 - d) 2 perkara ditarik kembali.
 - 3) Berdasarkan data penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011 yang ditemukan oleh Bawaslu, terdapat 1.718 pelanggaran Pemilukada selama Tahun 2011, dengan rincian:
 - a) 781 kasus atau 45% tidak ditindaklanjuti;
 - b) 937 kasus atau 55 % yang ditindaklanjuti yang terdiri dari:
 - 372 kasus pelanggaran pidana;
 - 365 kasus pelanggaran administratif; dan
 - 200 kasus lainnya.
- b. Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012
- 1) Pada Tahun 2012 dilaksanakan sebanyak 73 Pemilukada, yang terdiri dari 6 Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur, 50 Pemilukada Bupati/Wakil Bupati, dan 17 Pemilukada Walikota/Wakil Walikota. Sampai dengan bulan September 2012, telah dilaksanakan sebanyak 52 Pemilukada, yakni:
 - a) 4 Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur,
 - b) 36 Pemilukada Bupati/Wakil Bupati, dan
 - c) 12 Pemilukada Walikota/Wakil Walikota.Sisanya sebanyak 21 Pemilukada akan dilaksanakan pada bulan Oktober s.d. Desember 2012, yakni 2 Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur, 14 Pemilukada Bupati/Wakil Bupati, dan 5 Pemilukada Walikota/Wakil Walikota.
 - 2) Dari pelaksanaan 52 Pemilukada, sampai dengan tanggal 19 September 2012 terdapat 67 gugatan ke Mahkamah Konstitusi, yang terdiri dari:
 - a) 4 perkara dikabulkan;
 - b) 34 perkara ditolak;
 - c) 20 perkara tidak diterima; dan
 - d) 8 perkara ditarik kembali, dan
 - e) 1 perkara gugur.
- c. Pelaksanaan Pemilukada Terkait Jadwal Pemilu Tahun 2014 dan Rencana Pemilukada Serentak
- 1) Pengaturan keserentakan pelaksanaan Pemilukada bertujuan untuk:
 - a) Mengefisiensi waktu dan biaya pelaksanaan Pemilukada;
 - b) Memperkuat konsolidasi demokrasi antara Pemilu Nasional (atau Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) dengan Pemilu Lokal (atau Pemilukada);
 - c) Mewujudkan suatu periodisasi pemerintahan yang dapat membangun sinergi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
 - 2) Terdapat 4 (empat) opsi format Pemilukada Serentak, yakni:
 - a) Pemilihan Pemilukada Serentak
Opsi ini menawarkan 2 (dua) jenis pemilahan Pemilukada serentak, yakni:
 - Melakukan pemisahan antara Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) dengan Pemilu Lokal (atau Pemilukada serentak);

- Pelaksanaan Pemilukada serentak dilakukan bersamaan dengan Pemilu Presiden, sedangkan pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilakukan bersamaan.
- b) Pengelompokan (*Grouping*) Pelaksanaan Pemilukada
- Hasil pemetaan terhadap jadwal pelaksanaan Pemilukada memberikan gambaran atas opsi pengelompokan pelaksanaan Pemilukada, yakni:
- Kelompok Pertama, yakni 236 daerah yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2015 (masa bakti 2010-2015) dan 43 daerah yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2014 (masa bakti 2009-2014), kesemuanya melakukan Pemilukada serentak pada Tahun 2015. Sambil menanti saat pelaksanaan Pemilukada serentak pada Tahun 2015, Pemerintah melantik 43 Pejabat Kepala Daerah pada Tahun 2014.
 - Kelompok kedua, yakni 66 daerah yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2016 (masa bakti 2011-2016), 57 daerah yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2017 (masa bakti 2012-2017) dan 122 daerah yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2018 (masa bakti 2013-2018), kesemuanya melakukan Pemilukada serentak pada Tahun 2018. Sambil menanti pelaksanaan Pemilukada serentak pada Tahun 2018, Pemerintah melantik 123 Pejabat Kepala Daerah, dengan rincian 66 Pejabat Kepala Daerah dilantik pada Tahun 2016 dan 57 Pejabat Kepala daerah dilantik pada Tahun 2017.
- Selanjutnya diharapkan pada Tahun 2023 dapat dilakukan Pemilukada serentak pada 524 daerah di seluruh Indonesia, yakni 33 Pemilukada Provinsi dan 491 Pemilukada Kabupaten/Kota.
- c) Percepatan Atau Penggeseran Pemilukada, terkait dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014, pada opsi ini disusun 2 (dua) format, yakni:
- Melakukan percepatan jadwal pelaksanaan Pemilukada bagi 43 Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2014 (masa bakti 2009-2014) menjadi Pemilukada pada Tahun 2013. Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2013 tersebut tidak termasuk Pemilukada Gubernur DIY yang akan dilakukan melalui penetapan.
 - Melakukan penggeseran jadwal pelaksanaan Pemilukada Tahun 2014 menjadi Tahun 2015.
- d) Pemilukada Serentak Per-Provinsi, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan kekurangan pelayanan perekaman e-KTP sebanyak 24.603.431 orang penduduk wajib KTP, sehingga penyerahan/pendistribusian DAK2 dari Pemerintah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dari Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dapat dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2012 sesuai waktu yang dijadwalkan.
2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat pendistribusian fisik e-KTP melalui Pemerintah Daerah kepada seluruh warga masyarakat yang telah melaksanakan perekaman data e-KTP.

3. Komisi II DPR RI menugaskan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, yang mengatur bahwa e-KTP merupakan identitas tunggal dan efektif di Tahun 2013 serta lebih mengoptimalkan koordinasinya dengan seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat untuk memberikan gambaran yang utuh akan manfaat dan kelebihan dari KTP berbasis elektronik.
4. Terhadap rencana pelaksanaan Pemilu pada serentak, Komisi II DPR RI dapat menerima penjelasan Kementerian Dalam Negeri dengan berbagai alternatif untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan RUU Pemilu Kepala Daerah

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.16 WIB.

KETUA RAPAT,

ttd

Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si
A-219